

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mamuju, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, MSi
NIP. 196807201994032001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5. Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, MSi
NIP. 196807201994032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp228,040,630.00 atau mencapai 197.53% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp115,445,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp14,667,037,446.00 atau mencapai 96.29% dari alokasi anggaran sebesar Rp15,232,734,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp13,635,578,417.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2,884,576,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10,749,473,667.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1,528,750.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp13,635,578,417.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp157,098,500.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7,693,129,542.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7,536,031,042.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp195,922,130.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7,340,108,912.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp10,905,040,355.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7,340,108,912.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-4,368,349,842.00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14,438,996,816.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp13,635,578,417.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	115,445,000.00	228,040,630.00	197.53	12,296,168.00
Jumlah Pendapatan		115,445,000.00	228,040,630.00	197.53	12,296,168.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2,152,449,000.00	1,724,257,785.00	80.11	1,757,506,971.00
Belanja Barang	B.4.	7,803,342,000.00	7,745,976,661.00	99.26	4,372,655,544.00
Belanja Modal	B.5.	5,276,943,000.00	5,196,803,000.00	98.48	3,300,902,880.00
Jumlah Belanja		15,232,734,000.00	14,667,037,446.00	96.29	9,431,065,395.00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	2,884,576,000.00	231,722,500.00
Jumlah Aset Lancar		2,884,576,000.00	231,722,500.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	375,560,000.00	375,560,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	5,126,835,608.00	4,346,996,608.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	8,943,219,000.00	9,438,183,262.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	180,680,000.00	180,680,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	106,183,200.00	106,183,200.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0.00	145,057,000.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7.	-3,819,488,386.00	-3,264,276,900.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7.	-154,481,756.00	-655,111,482.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7.	-9,033,999.00	-3,011,333.00
Jumlah Aset Tetap		10,749,473,667.00	10,670,260,355.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	11,673,573.00	11,673,573.00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-10,144,823.00	-8,616,073.00
Jumlah Aset Lainnya		1,528,750.00	3,057,500.00
Jumlah Aset		13,635,578,417.00	10,905,040,355.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban		0.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	13,635,578,417.00	10,905,040,355.00
Jumlah Ekuitas		13,635,578,417.00	10,905,040,355.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		13,635,578,417.00	10,905,040,355.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	157,098,500.00	12,296,000.00
JUMLAH PENDAPATAN		157,098,500.00	12,296,000.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1,724,257,785.00	1,757,506,971.00
Beban Persediaan	D.3.	1,805,373,500.00	1,537,852,000.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1,696,680,856.00	1,686,257,618.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	307,217,054.00	323,908,106.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1,408,831,751.00	877,755,133.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	750,768,596.00	701,203,908.00
JUMLAH BEBAN		7,693,129,542.00	6,884,483,736.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7,536,031,042.00	-6,872,187,736.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	195,922,130.00	284,275,668.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		195,922,130.00	284,275,668.00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-7,340,108,912.00	-6,587,912,068.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	10,905,040,355.00	8,066,760,696.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7,340,108,912.00	-6,587,912,068.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1.	-4,454,917,102.00	-1,528,750.00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2.	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3.	86,567,260.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	14,438,996,816.00	9,427,720,477.00
EKUITAS AKHIR		13,635,578,417.00	10,905,040,355.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.020/5/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, mempunyai tugas pokok antara lain: 1) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 2) Melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi, 3) Melaksanakan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan, 4) Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 5) Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi, dan 6) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	115,445,000.00	115,445,000.00
Jumlah Pendapatan	115,445,000.00	115,445,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,170,098,000.00	2,152,449,000.00
Belanja Lembur	82,351,000.00	0.00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	85,937,000.00	0.00
Belanja Barang Operasional	486,600,000.00	486,600,000.00
Belanja Barang Non Operasional	2,152,878,000.00	982,662,000.00
Belanja Barang Persediaan	2,807,380,000.00	1,604,290,000.00
Belanja Jasa	395,800,000.00	237,600,000.00
Belanja Pemeliharaan	306,650,000.00	306,650,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,991,440,000.00	1,439,540,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	3,362,500,000.00	2,746,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375,000,000.00	790,943,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,286,000,000.00	4,486,000,000.00
Jumlah Belanja	18,502,634,000.00	15,232,734,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp228,040,630.00 atau mencapai 197.53% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp115,445,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	8,910,000.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	70,942,130.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	115,445,000.00	148,188,500.00	128.36
Jumlah	115,445,000.00	228,040,630.00	197.53

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,754.57% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8,910,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	70,942,130.00	168.00	42,227,358.33
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	148,188,500.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0.00	12,296,000.00	-100.00
Jumlah	228,040,630.00	12,296,168.00	1,754.57

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp14,667,037,446.00 atau 96.29% dari anggaran belanja sebesar Rp15,232,734,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2,152,449,000.00	1,724,982,932.00	80.14
Belanja Barang	7,803,342,000.00	7,745,976,661.00	99.26
Belanja Modal	5,276,943,000.00	5,196,803,000.00	98.48
Total Belanja Kotor	15,232,734,000.00	14,667,762,593.00	96.29
Pengembalian Belanja		-725,147.00	0.00
Total Belanja	15,232,734,000.00	14,667,037,446.00	96.29

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 55.52% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Bertambahnya pegawai (CPNS) di BPTP Sulbar sebanyak 2 orang pada tahun 2018.
2. Adanya kenaikan fungsional peneliti 1 orang dan penyuluh 1 orang
3. Bertambahnya biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran BPTP Sulawesi Barat.
4. Adanya pembangunan gedung UPBS dan Laboratorium Pascapanen.
5. Pembelian kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit (Innova dan Rush) dan roda 2 sebanyak 1 unit (motor Trailer pendukung kegiatan UPBS).
6. Pembelian peralatan kantor dan rumah tangga kantor BPTP Sulawesi Barat

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	1,724,257,785.00	1,757,506,971.00	-1.89
Belanja Barang	7,745,976,661.00	4,372,655,544.00	77.15
Belanja Modal	5,196,803,000.00	3,300,902,880.00	57.44
Total Belanja	14,667,037,446.00	9,431,065,395.00	55.52

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,724,257,785.00 dan Rp1,757,506,971.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -1.89% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Pegawai BPTP Sulawesi Barat 1 orang per bulan November pensiun dan penghentian fungsional 1 orang peneliti madya.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,724,982,932.00	1,670,585,149.00	3.26
Belanja Lembur	0.00	86,922,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	1,724,982,932.00	1,757,507,149.00	-1.85
Pengembalian Belanja Pegawai	-725,147.00	-178.00	407,285.96
Jumlah Belanja	1,724,257,785.00	1,757,506,971.00	-1.89

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7,745,976,661.00 dan Rp4,372,655,544.00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 77.15% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Bertambahnya biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran BPTP Sulawesi Barat.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	483,844,000.00	432,425,000.00	11.89
Belanja Barang Non Operasional	975,264,255.00	1,038,431,840.00	-6.08
Belanja Barang Persediaan	1,602,147,000.00	1,508,198,000.00	6.23

Belanja Jasa	237,572,601.00	224,426,465.00	5.86
Belanja Pemeliharaan	306,617,054.00	291,419,106.00	5.22
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,408,831,751.00	877,755,133.00	60.50
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	2,731,700,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	7,745,976,661.00	4,372,655,544.00	77.15
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	7,745,976,661.00	4,372,655,544.00	77.15

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5,196,803,000.00 dan Rp3,300,902,880.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 57.44% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembangunan Gudang UPBS dan Laboratorium Pascapanen
2. Pembelian kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit (Innova dan Rush) roda 2 sebanyak 1 unit (motor Trailer pendukung kegiatan UPBS)
3. Pembelian peralatan kantor dan rumah tangga kantor BPTP Sulawesi Barat

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0.00	375,560,000.00	-100.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779,839,000.00	419,135,400.00	86.06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,416,964,000.00	2,325,527,480.00	89.93
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	180,680,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	5,196,803,000.00	3,300,902,880.00	57.44
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	5,196,803,000.00	3,300,902,880.00	57.44

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp779,839,000.00 dan Rp419,135,400.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018

mengalami kenaikan sebesar 86.06% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pembelian Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya sebanyak 2 Unit senilai Rp. 619.042.000,-
2. Pembelian kendaraan bermotor roda dua lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp. 31.597.000,-
3. Pembelian lemari kayu 3 unit senilai Rp. 12.000.000,-
4. Pembelian lemari display 2 unit senilai Rp. 7.200.000,-
5. Pembelian meja kerja kayu 1 unit senilai Rp. 2.615.000,-
6. Pembelian kursi kayu 2 unit senilai Rp. 5.350.000,-
7. Pembelian tempat tidur kayu 2 unit senilai Rp. 15.000.000,-
8. Pembelian meja makan kayu 1 unit senilai Rp. 3.750.000,-
9. Pembelian rak sepatu (aluminium) 1 unit senilai Rp. 1.900.000,-
10. Pembelian lemari es 1 unit senilai Rp. 8.920.000,-
11. Pembelian kompor gas (alat dapur) 1 unit senilai Rp. 665.000,-
12. Pembelian Televisi 1 unit senilai Rp.7.900.000,-
13. Pembelian karpet 2 buah senilai Rp. 3.000.000,-
14. Pembelian laptop 3 unit senilai Rp. 26.940.000,-
15. Pembelian personal komputer lainnya 1 unit senilai Rp. 9.460.000,-
16. Pembelian Air Conditioning (AC) 3 unit senilai Rp. 16.500.000,-
17. Pembelian Matras 2 unit senilai Rp. 8.000.000,-

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779,839,000.00	419,135,400.00	86.06
Jumlah Belanja Kotor	779,839,000.00	419,135,400.00	86.06
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	779,839,000.00	419,135,400.00	86.06

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4,416,964,000.00 dan Rp2,325,527,480.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 89.93% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

Adanya pembangunan Gedung UPBS dan Laboratorium Pascapanen

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,416,964,000.00	2,325,527,480.00	89.93
Jumlah Belanja Kotor	4,416,964,000.00	2,325,527,480.00	89.93
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	4,416,964,000.00	2,325,527,480.00	89.93

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2,884,576,000.00 dan Rp231,722,500.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	1,403,000.00	397,000.00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,731,700,000.00	0.00
Bahan Baku	26,703,000.00	62,928,000.00
Persediaan Lainnya	124,770,000.00	168,397,500.00
Jumlah	2,884,576,000.00	231,722,500.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp375,560,000.00 dan Rp375,560,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5,126,835,608.00 dan Rp4,346,996,608.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	4,346,996,608.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	779,839,000.00
Saldo per 31 Desember 2018	5,126,835,608.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-3,819,488,386.00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	1,307,347,222.00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Pembelian kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit (Innova dan Rush) roda 2 sebanyak 1 unit (motor Trailer pendukung kegiatan UPBS)
2. Pembelian peralatan kantor dan rumah tangga kantor BPTP Sulawesi Barat

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8,943,219,000.00 dan Rp9,438,183,262.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	9,438,183,262.00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4,562,021,000.00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	86,567,260.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-174,624,722.00
Koreksi Pencatatan	-4,968,927,800.00
Saldo per 31 Desember 2018	8,943,219,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-154,481,756.00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	8,788,737,244.00

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa :

1. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp. 4,562,021,000.00
2. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 86,567,260.00

Mutasi transaksi Pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa :

1. Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali senilai Rp. -174,624,722.00
2. Koreksi Pencatatan senilai Rp. -4,968,927,800.00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp180,680,000.00 dan Rp180,680,000.00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp106,183,200.00 dan Rp106,183,200.00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp145,057,000.00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-3,983,004,141.00 dan Rp-3,922,399,715.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	5,126,835,608.00	-3,819,488,386.00	1,307,347,222.00
2.	Gedung dan Bangunan	8,943,219,000.00	-154,481,756.00	8,788,737,244.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	180,680,000.00	-9,033,999.00	171,646,001.00
4.	Aset Tetap Lainnya	106,183,200.00	0.00	106,183,200.00
Akumulasi Penyusutan		14,356,917,808.00	-3,983,004,141.00	10,373,913,667.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11,673,573.00 dan Rp11,673,573.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	11,673,573.00
Jumlah	11,673,573.00

C.3.2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-10,144,823.00 dan Rp-8,616,073.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	11,673,573.00	-10,144,823.00	1,528,750.00
Akumulasi Penyusutan		11,673,573.00	-10,144,823.00	1,528,750.00

C.5. EKUITAS

C.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13,635,578,417.00 dan Rp10,905,040,355.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp157,098,500.00 dan Rp12,296,000.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	148,188,500.00	0.00	0.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0.00	12,296,000.00	-100.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	8,910,000.00	0.00	0.00
Jumlah	157,098,500.00	12,296,000.00	1,177.64

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,724,257,785.00 dan Rp1,724,257,785.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	1,209,111,020.00	1,144,873,200.00	5.61
Beban Pembulatan Gaji PNS	16,763.00	16,407.00	2.17
Beban Tunj. Anak PNS	22,842,802.00	20,240,450.00	12.86
Beban Tunj. Beras PNS	57,501,480.00	56,632,440.00	1.53
Beban Tunj. Fungsional PNS	128,720,000.00	176,650,000.00	-27.13
Beban Tunj. PPh PNS	7,370,240.00	7,687,434.00	-4.13
Beban Tunj. Struktural PNS	32,760,000.00	7,380,000.00	343.90

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	76,229,480.00	73,143,040.00	4.22
Beban Tunjangan Umum PNS	45,165,000.00	42,415,000.00	6.48
Beban Uang Lembur	0.00	86,922,000.00	-100.00
Beban Uang Makan PNS	144,541,000.00	141,547,000.00	2.12
Jumlah	1,724,257,785.00	1,757,506,971.00	-1.89

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,805,373,500.00 dan Rp1,537,852,000.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	37,325,000.00	442,218,000.00	-91.56
Beban Persediaan konsumsi	1,598,786,000.00	578,135,000.00	176.54
Beban persediaan lainnya	169,262,500.00	517,499,000.00	-67.29
Jumlah	1,805,373,500.00	1,537,852,000.00	17.40

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,696,680,856.00 dan Rp1,686,257,618.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	396,173,000.00	422,137,050.00	-6.15
Beban Barang Non Operasional Lainnya	546,341,255.00	579,044,790.00	-5.65
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45,600,000.00	40,200,000.00	13.43

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Honor Output Kegiatan	32,750,000.00	37,250,000.00	-12.08
Beban Jasa Profesi	58,600,000.00	40,100,000.00	46.13
Beban Keperluan Perkantoran	438,244,000.00	392,225,000.00	11.73
Beban Langganan Listrik	143,995,732.00	107,554,244.00	33.88
Beban Langganan Telepon	29,976,869.00	17,746,534.00	68.92
Beban Sewa	5,000,000.00	50,000,000.00	-90.00
Jumlah	1,696,680,856.00	1,686,257,618.00	0.62

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp307,217,054.00 dan Rp323,908,106.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69,999,000.00	50,420,000.00	38.83
Beban Pemeliharaan Jaringan	7,969,000.00	8,000,000.00	-0.39
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	228,649,054.00	232,999,106.00	-1.87
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	600,000.00	9,889,000.00	-93.93
Beban Persediaan suku cadang	0.00	22,600,000.00	-100.00
Jumlah	307,217,054.00	323,908,106.00	-5.15

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,408,831,751.00 dan Rp877,755,133.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1,337,259,806.00	632,388,050.00	111.46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,640,000.00	17,410,000.00	41.53
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46,931,945.00	227,957,083.00	-79.41
Jumlah	1,408,831,751.00	877,755,133.00	60.50

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp750,768,596.00 dan Rp701,203,908.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	1,528,750.00	1,528,750.00	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	188,005,694.00	166,867,447.00	12.67
Beban Penyusutan Irigasi	6,022,666.00	3,011,333.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	555,211,486.00	529,796,378.00	4.80
Jumlah	750,768,596.00	701,203,908.00	7.07

D.8. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	210,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	124,770,000.00	284,275,500.00	-56.11
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8,975,500.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	28,766,630.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	33,200,000.00	168.00	19,761,804.76
Jumlah	195,922,130.00	284,275,668.00	-31.08

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10,905,040,355.00 dan Rp8,066,760,696.00.

E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-7,340,108,912.00 dan Rp-6,587,912,068.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-4,368,349,842.00 dan Rp-1,528,750.00.

E.4.1. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-4,454,917,102.00 dan Rp-1,528,750.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan

aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	514,010,698.00
Gedung dan Bangunan	-4,968,927,800.00
Jumlah	-4,454,917,102.00

E.4.2. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.4.3. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp86,567,260.00 dan Rp0.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung dan Bangunan	-88,057,462.00
Jumlah	86,567,260.00

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14,438,996,816.00 dan Rp9,427,720,477.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14,667,037,446.00
Diterima dari Entitas Lain	-228,040,630.00
Jumlah	14,438,996,816.00

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-228,040,630.00 sedangkan DKEL sebesar Rp14,667,037,446.00.

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0.00 yang terdiri dari:

E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13,635,578,417.00 dan Rp10,905,040,355.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Penjelasan

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Penjelasan TTP terkait lokasi, anggaran, realisasi dan waktu penyerahan ke pemda

-